



## Pengaruh Kebijakan Sekolah Gratis Terhadap Peran Serta Orang Tua dan Peningkatan Prestasi Sekolah di Kabupaten Pemalang

Agus Setio Widodo<sup>1</sup>  
Khaerudin<sup>2</sup>  
Fizar<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia  
<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pemalang, Indonesia

Corresponding Author: [dosen\\_muda@yahoo.co.id](mailto:dosen_muda@yahoo.co.id)

### Article Info

**Keyword:**  
Keyword 1;  
Free School Policy;  
Keyword 2;  
The Role Of Parents;  
Keyword 3;  
Achievement.

**Abstract:** Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System mandates that every citizen aged 7-15 years is obliged to attend basic education. However, in fact not all citizens can experience or receive formal education. To support the implementation of the Compulsory Education program, the government through the Ministry of National Education Regulation number 69 of 2009, launched the BOS program (School Operational Assistance). In general, the BOS program aims to ease the burden on the community on education financing in the context of quality 9-year compulsory education, as well as to play a role in accelerating the achievement of the Minimum Service Standards (SPM) in schools that have not met the SPM, and achieved the National Education Standards (SNP) at schools that have met the MSS. This study examines the extent of the influence of the free school policy on parental participation and increased school achievement. As well as to what extent the role of the School Committee in carrying out its participation in the management of school administration at the basic education level in order to realize the free school policy. With a quantitative approach through the survey method, it was found that the use of BOS funds in Pemalang District had referred to the provisions. However, BOS funds cannot pay for the overall implementation of education, so this study recommends that schools always publish a list of components that can and cannot be funded by boss funds and the use of boss funds in schools according to components and the amount of funds on the school / madrasah announcement board.

**Kata Kunci:**  
Kata kunci 1;  
Kebijakan Sekolah  
Gratis;  
Kata kunci 2;  
Peran Orang Tua;;  
Kata kunci 3;  
Prestasi.

**Abstrak:** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Namun kenyataannya tidak semua warga Negara dapat merasakan atau mengenyam pendidikan formal. Untuk mendukung pelaksanaan program Wajib Belajar, pemerintah melalui Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, meluncurkan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah- sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM. kajian ini meneliti sejauh mana pengaruh kebijakan sekolah gratis terhadap peran serta orang tua dan peningkatan prestasi sekolah. Serta sejauh mana peran Komite Sekolah dalam menjalankan peran sertanya dalam manajemen penyelenggaraan sekolah di tingkat pendidikan dasar dalam rangka merealisasikan kebijakan sekolah gratis. Dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survey ternyata didapatkan hasil bahwa Penggunaan dana BOS di Kabupaten Pemalang sudah mengacu pada ketentuan. Namun demikian Dana

---

BOS tidak bisa membiayai penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan sehingga penelitian ini merekomendasikan agar sekolah selalu mengumumkan daftar komponen yg boleh dan yg tidak boleh dibiayai oleh dana bos serta penggunaan dana bos di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah/ madrasah.

---

**Article History: Received 2-Agustus-2020, Revised 9-September-2020, Accepted: 11-Oktober-2020**

---

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Namun kenyataannya tidak semua warga Negara dapat merasakan atau mengenyam pendidikan formal. Untuk mendukung pelaksanaan program Wajib Belajar, pemerintah melalui Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, meluncurkan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM. Kajian ini meneliti sejauh mana pengaruh kebijakan sekolah gratis terhadap peran serta orang tua dan peningkatan prestasi sekolah. Serta sejauh mana peran Komite Sekolah dalam menjalankan peran sertanya dalam manajemen penyelenggaraan sekolah di tingkat pendidikan dasar dalam rangka merealisasikan kebijakan sekolah gratis. Dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survey ternyata didapatkan hasil bahwa Penggunaan dana BOS di Kabupaten Pemalang sudah mengacu pada ketentuan. Namun demikian Dana BOS tidak bisa membiayai penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan sehingga penelitian ini merekomendasikan agar sekolah selalu mengumumkan daftar komponen yg boleh dan yg tidak boleh dibiayai oleh dana bos serta penggunaan dana bos di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah/ madrasah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Semenjak tahun 2003 wajib belajar pendidikan dasar telah menjadi komitmen bangsa dengan payung hukum tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.

Meskipun dalam konstitusi telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, namun kenyataannya tidak semua warga Negara dapat merasakan atau mengenyam pendidikan formal. Hal ini dibuktikan berdasarkan data Bappenas, pada tahun 2014, rata-rata angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang untuk kelompok umur 7-12 tahun (jenjang SD) adalah 0,12%, untuk kelompok umur 13-15 tahun (jenjang SMP) adalah 0,44% (<http://simpadu-pk-bappenas.go.id>)

Untuk mendukung pelaksanaan program Wajib Belajar, pemerintah melalui Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, meluncurkan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk menyediakan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah- sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang

sudah memenuhi SPM. Program BOS ini diterapkan di seluruh Kabupaten/Kecamatan/Kota di Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Pemalang. Program pendanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini sendiri sudah mulai disalurkan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2005.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2013 APK SD telah mencapai 111,27%, sedangkan SMP pada tahun 2013 telah mencapai 79,04% (pemalangkab.bps.go.id, 2015). Adapun data Angka Putus Sekolah di Kabupaten Pemalang untuk tingkat sekolah dasar sebesar 0,12%, sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah sebesar 0,44% (Bappenas, 2015)

Berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pemalang (2015), IPM di Kabupaten Pemalang tahun 2013 adalah 71,26 dengan angka harapan hidup sebesar 68.52%, angka melek huruf sebesar 91,09, rata-rata lama sekolah 6,56 (tahun), sedangkan pengeluaran perkapita sebanyak 645,35. Perkembangan data indikator IPM Tahun 2009-2013 Kabupaten Pemalang dapat dicermati pada tabel berikut;

**Tabel 1. Indikator IPM Tahun 2009-2013**

Tahun	Angka harapan hidup (tahun)	Persentase melek huruf	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan Ribuan/PPP	IPM
2009	67,46	87,75	6,49	634,26	69,02
2010	67,68	90,76	6,49	635,26	69,89
2011	67,90	90,79	6,51	637,71	70,22
2012	68,12	90,80	6,51	641,52	70,66
2013	68,52	91,09	6,56	645,35	71,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang tahun 2015

Sedangkan berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang berada pada posisi urutan 35 di antara kabupaten/kota lain di Jawa Tengah dengan penjelasan sebagai berikut: angka harapan hidup (tahun) sebesar 72,64, presentase rata-rata lama sekolah (tahun) sebesar 11,26, harapan lama sekolah (tahun) sebesar 5,87, pengeluaran sebesar 6910,76, sedangkan IPM Kabupaten Pemalang sebesar 62,35 di bawah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banjarnegara (BPS Jawa Tengah, 2015).

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar sembilan tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan lainnya setelah desentralisasi diberlakukan adalah pembentukan Komite Sekolah. Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut sama yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disebutkan bahwa Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.

Disebutkan juga dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3 bahwa Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, pemerintah Kabupaten Pemalang tanpa terkecuali telah melaksanakan program Wajib Belajar 9 Tahun. Untuk mendukung

pelaksanaan Wajib Belajar, pemerintah daerah Kabupaten Pemalang telah memberlakukan program Sekolah Gratis sejak 2005 Program tersebut merupakan implementasi dari komitmen pelaksanaan program BOS di Kabupaten Pemalang. Disamping itu, pembentukan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan juga sudah diterapkan sejak tahun 2002.

Berdasarkan beberapa hal di atas, kajian ini membahas bagaimana efektivitas dari kedua program atau kebijakan yang sudah diterapkan di Kabupaten Pemalang. Dalam hal ini ialah kebijakan sekolah gratis, dan kebijakan pembentukan komite sekolah. Sejauh mana pengaruh kebijakan sekolah gratis terhadap peran serta orang tua dan peningkatan prestasi sekolah. Serta sejauh mana peran Komite Sekolah dalam menjalankan peran sertanya dalam manajemen penyelenggaraan sekolah di tingkat pendidikan dasar dalam rangka merealisasikan kebijakan sekolah gratis.

## METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dimana untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian, data kuantitatif menurut Sugiyono merupakan data-data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Penelitian kuantitatif merupakan definisi pengukuran data kuantitatif dan sistematis objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pernyataan tentang survey dengan berfokus pada variabel inti yaitu mengenai kebijakan sekolah gratis terhadap peran serta orang tua dan peningkatan prestasi sekolah pada pendidikan dasar di Kabupaten Pemalang.

Langkah penelitian kuantitatif adalah: Pertama, menentukan topik masalah. Kedua, menentukan hipotesis. Ketiga, menentukan data yang diperlukan. Keempat, menentukan dan memilih metode penelitian. Kelima, melakukan persiapan sebelum ke lapangan. Keenam, memasuki lapangan dalam rangka mengumpulkan data. Ketujuh, analisis data. Kedelapan, menulis laporan.

## TEMUAN DAN HASIL

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan merupakan investasi berharga dalam meraih keberhasilan visi dan misi kabupaten Pemalang. Kesungguhan untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan di kabupaten Pemalang tercermin dalam visi Kabupaten Pemalang, “Kabupaten Pemalang yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia.” Untuk itu implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi poin penting dalam menapaki berbagai kegiatan pembangunan lain di kabupaten Pemalang.

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Pemalang (2015) jumlah Sekolah/Madrasah, Murid dan Guru pada Tingkat Pendidikan Dasar yang tercatat di wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebanyak 1012 sekolah, dengan jumlah murid sebanyak 228.696 orang, dan jumlah guru sebanyak 12.237 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 2. Banyaknya Sekolah/Madrasah, Murid dan Guru pada Tingkat Pendidikan Dasar di Kabupaten Pemalang**

Tingkat Pendidikan	Banyaknya		
	Sekolah	Murid	Guru
Sekolah Dasar Negeri	750	141.673	7.140
Sekolah Dasar Swasta	19	3.037	196
SLTP Negeri	74	46.335	2.476
SLTP Swasta	49	10.360	801
Madrasah Ibtidaiyah Negeri	3	1.079	53
Madrasah Ibtidaiyah Swasta	77	12.721	697
Madrasah Tsanawiyah Negeri	2	2.383	132
Madrasah Tsanawiyah Swasta	38	11.108	742

Jumlah	1.012	228.696	12.237
--------	-------	---------	--------

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pematang tahun 2015

Secara keseluruhan jumlah responden pada survei ini terbagi ke dalam beberapa kelompok, dengan rincian 80 orang kepala sekolah, 76 komite sekolah, dan 79 orang tua. Data disajikan berdasarkan jumlah kuesioner yang kembali dan terisi secara penuh. Usia responden yang menjadi sampel untuk kepala sekolah adalah berkisar dari usia 30 s/d 50 tahun sebanyak 48,1%, dan usia lebih dari 50 tahun sebanyak 51,9%. Responden komite sekolah berusia kurang dari 30 tahun sebanyak 2,7%, usia 30 s/d 50 tahun sebanyak 55,4% sedangkan yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 41,9%. Responden orang tua siswa berusia kurang dari 30 tahun sebanyak 5,1%, usia 30 s/d 50 tahun sebanyak 87,3% sedangkan yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 7,6%.

Jenis kelamin responden yang telah menjadi sampel survei, diantaranya responden kepala sekolah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 75% sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 25%. Jenis kelamin responden komite sekolah yang telah menjadi sampel survei bervariasi, diantaranya responden komite sekolah laki-laki sebanyak 88,2% sedangkan perempuan sebanyak 11,8%. Jenis kelamin responden orang tua siswa yang telah menjadi sampel survei bervariasi, diantaranya responden orang tua siswa laki-laki sebanyak 48,1% sedangkan perempuan sebanyak 51,9%.

Untuk tingkat pendidikan, kepala sekolah, komite sekolah maupun orang tua siswa jika dilihat pada tabel 4.3 dibawah, menunjukkan mayoritas responden tingkat pendidikan kepala sekolah berpendidikan sarjana S1 sebanyak 84,8% sedangkan yang berpendidikan pasca sarjana S2 sebanyak 15,2%. Tingkat pendidikan komite sekolah berpendidikan tamat SD sebanyak 6,6%, berpendidikan tamat SMP sebanyak 18,4%, tamat SMA sebanyak 36,8%, tamat Diploma/D3 sebanyak 7,9%, tamat sarjana S1 sebanyak 28,9% sedangkan yang berpendidikan pasca sarjana S2 sebanyak 1,3%. Tingkat pendidikan orang tua siswa berpendidikan tamat SD sebanyak 20%, berpendidikan tamat SMP sebanyak 26,7%, tamat SMA sebanyak 18,7%, tamat D3 sebanyak 2,7%, tamat sarjana S1 sebanyak 32% sedangkan yang berpendidikan pasca sarjana S2 sebanyak 0% atau tidak ada.

Berdasarkan dari hasil angket untuk memperoleh informasi terhadap usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan responden pada survei ini ditemukan berbagai data dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

**Tabel 3. Jenis Kelamin Responden**

No	Jenis Kelamin	Jumlah		
		Kepala Sekolah	Komite	Orang Tua
1	Laki-Laki	60	7	38
2	Perempuan	20	9	41
	Jumlah	80	6	79

Sumber: Data Primer

Sedangkan untuk tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4. Tingkat Pendidikan Terakhir Responden**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		
		Kepsek	Komite	Orang Tua
1	Tamat SD	0	5	15
2	Tamat SMP	0	4	20
3	Tamat SMA	0	8	14
4	Tamat D3/Akademi/Sarjana Muda	0	6	2
5	Sarjana S1	7	2	24
6	Magister S2	2	1	0
7	Doktor S3	0	0	0
Jumlah		9	76	75

Sumber: Data Primer

Sebagaimana buku petunjuk penggunaan dana BOS, bahwa dana BOS bisa digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: Administrasi penerimaan siswa baru, pembelian buku referensi, pembelian buku tesk pelajaran untuk perpustakaan, membiayai kegiatan remedial, pengayaan dan ekstra kurikuler, membiayai ulangan/ujian dan laporan hasil belajar siswa, beli bahan habis pakai, membayar langgaran daya dan jasa, biaya perawatan sekolah, membayar honorarium guru honor dana tenaga kependidikan honorer, biaya pengembangan profesi guru, bantuan biaya transport bagi siswa miskin, biaya administrasi pengelolaan BOS, pembelian komputer untuk pembelajaran siswa dan lainnya (konsumsi rapat dan lain-lain).

Terhadap ketentuan tersebut, hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan dana sudah mengacu kepada ketentuan sebagaimana tersebut, dengan persentase penggunaan untuk masing-masing bidang sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Penggunaan dana BOS untuk Administrasi Penerimaan Siswa Baru

Setiap tahun sekolah tentunya melaksanakan penerimaan siswa baru. Gambaran Penggunaan dana BOS untuk bidang administrasi penerimaan siswa baru dapat digambarkan pada tabel 5 berikut:

**Tabel 5. Persentase Penggunaan Dana BOS untuk Penerimaan Siswa Baru**

No	Presentase Penggunaan	Jumlah Sekolah	Persentase
1	< 5%	57	71,3
2	5 - 10%	18	22,5
3	11 - 15%	1	1,3
4	16 - 20%	0	0,0
5	21 - 25%	0	0,0
6	> 25%	4	5,0
Jumlah		80	100

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa hampir 71,3 % responden mengatakan bahwa penggunaan dana BOS untuk administrasi penerimaan siswa baru kurang dari 5%. Walaupun ada dana BOS khusus untuk buku, namun dana BOS umum ini juga diperbolehkan untuk membeli buku-buku referensi di sekolah. Persentase penggunaan dana BOS untuk bidang ini dapat terlihat pada table 6 berikut:

**Tabel 6. Persentase penggunaan dana BOS untuk pembelian buku referensi**

No	Presentase Penggunaan	Jumlah Sekolah	Persentase
1	< 5%	32	40,5
2	5 - 10%	37	46,8
3	11 - 15%	6	7,6
4	16 - 20%	4	5,1
5	21 - 25%	0	0,0
6	> 25%	0	0,0
Jumlah		79	100

*Sumber: Data Primer*

Dari tabel di atas terlihat bahwa lebih dari 46,8% responden mengatakan kurang antara 5-10% penggunaan dana BOS untuk pembelian buku referensi. Hal ini diduga karena sekolah juga mendapatkan BOS untuk buku.

Selain untuk pembelian buku referensi, dana BOS juga bisa digunakan untuk pembelian buku Teks perpustakaan. Persentase penggunaan dana BOS terhadap bidang ini dapat terlihat pada tabel 7 berikut:

**Tabel 7. Persentase penggunaan dana BOS untuk Pembelian Buku Teks Perpustakaan**

No	Presentase Penggunaan	Jumlah Sekolah	Persentase
1	< 5%	24	30,8
2	5 - 10%	40	51,3
3	11 - 15%	12	15,4
4	16 - 20%	0	0,0
5	21 - 25%	1	1,3
6	> 25%	1	1,3
Jumlah		78	100

*Sumber: Data Primer*

Tidak jauh berbeda dengan penggunaan untuk buku referensi, persentase penggunaan untuk buku teks perpustakaan juga hampir 51,3% responden menjawab antara 5 sampai dengan 10%.

Dari dana BOS sekolah juga bisa mengalokasikan dana untuk kegiatan remedial, pengayaan ataupun kegiatan ekstra kurikuler. Terhadap bidang ini, tampaknya responden memberikan jawaban yang bervariasi, sebagaimana tabel 8 berikut:

**Tabel 8. Persentase penggunaan dana BOS untuk Remedial, Pengayaan dan Ekstra Kurikuler**

No	Presentase Penggunaan	Jumlah Sekolah	Persentase
1	< 5%	13	16,5
2	5 - 10%	34	43,0
3	11 - 15%	20	25,3
4	16 - 20%	6	7,6
5	21 - 25%	3	3,8
6	> 25%	3	3,8
Jumlah		79	100

*Sumber: Data Primer*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa persentase penggunaan dana BOS untuk kegiatan remedial, pengayaan dan kegiatan ekstra kurikuler berkisar antara 5 sampai 10% sebanyak 43%.

Setiap ada ulangan/ujian tentu memerlukan biaya, khususnya untuk pembuatan soal-soal ulangan atau ujian. Begitu pula untuk pembuatan laporan hasil belajar siswa. Persentase penggunaan dana BOS untuk bidang ini dapat terlihat pada tabel 9 berikut:

**Tabel 9. Persentase penggunaan dana BOS untuk Ulangan/Ujian dan Laporan Hasil Belajar Siswa**

No	Persentase Penggunaan	Jumlah Sekolah	Persentase
1	< 5%	6	7,8
2	5 - 10%	10	13,0
3	11 - 15%	24	31,2
4	16 - 20%	15	19,5
5	21 - 25%	15	19,5
6	> 25%	7	9,1
Jumlah		77	100

Sumber: Data Primer

Tabel di atas menggambarkan bahwa persentase penggunaan dana BOS untuk ulangan/ujian dan laporan hasil belajar siswa sebagian responden mengatakan antara 11 sampai 15% sebanyak 31,2%.

Bidang lain yang juga bisa dianggarkan dari dana BOS adalah pembelian bahan habis pakai, seperti bahan ATK. Terhadap bidang ini persentase penggunaan dana BOS dapat diketahui dari tabel 10 berikut:

**Tabel 10. Persentase penggunaan dana BOS untuk Bahan (Habis Pakai)**

No	Persentase Penggunaan	Jumlah Sekolah	Persentase
1	< 5%	16	21,3
2	5 - 10%	25	33,3
3	11 - 15%	15	20,0
4	16 - 20%	9	12,0
5	21 - 25%	6	8,0
6	> 25%	4	5,3
Jumlah		75	100

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penggunaan dana BOS untuk bahan habis pakai sebagian besar responden mengatakan 5% sampai dengan 10%, namun demikian ternyata ada juga sekolah yang mengalokasikan dana BOS lebih dari 20%.

Bagi sekolah yang mempunyai aliran listrik, telepon dan PDAM tentunya memerlukan alokasi dana untuk pembayaran iuran setiap bulan. Persentase penggunaan dana BOS terhadap bidang ini dapat dilihat pada tabel 11 berikut:

**Tabel 11. Persentase penggunaan dana BOS untuk Membayar Langganan Daya dan Jasa**

No	Persentase Penggunaan	Jumlah Sekolah	Persentase
1	< 5%	44	60,3
2	5 - 10%	21	28,8
3	11 - 15%	4	5,5
4	16 - 20%	2	2,7
5	21 - 25%	1	1,4
6	> 25%	1	1,4
Jumlah		73	100

Sumber: Data Primer

Tabel di atas memperlihatkan bahwa mayoritas responden mengatakan bahwa untuk pembayaran langganan daya dan jasa mereka hanya menganggarkan dana kurang dari 5 %.

Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan biaya perawatan sekolah adalah perawatan yang sifatnya ringan seperti pengecatan sekolah, perbaikan pintu dan jendela sekolah. Persentase penggunaan dana BOS untuk bidang ini dapat terlihat pada tabel 12 berikut:

**Tabel 12. Persentase penggunaan dana BOS untuk Biaya Perawatan Sekolah**

No	Presentase Penggunaan	Jumlah Sekolah	Persentase
1	< 5%	7	9,2
2	5 - 10%	40	52,6
3	11 - 15%	16	21,1
4	16 - 20%	7	9,2
5	21 - 25%	5	6,6
6	> 25%	1	1,3
Jumlah		73	100

*Sumber: Data Primer*

Hampir semua sekolah yang diteliti mengatakan kekurangan guru, khususnya sekolah yang berada di daerah atau sekolah yang berstatus swasta. Untuk mengatasi kekurangan guru tersebut, sekolah mencari guru honor. Sebagai konsekuensinya, mereka harus mengalokasikan dana untuk membayar gaji guru yang berstatus honor tersebut. Persentase penggunaan dana BOS untuk pembayaran honorarium guru honor dan tenaga kependidikan honorer dapat terlihat pada tabel 13 berikut:

**Tabel 13. Persentase penggunaan dana BOS untuk Honorarium Guru dan tenaga Kependidikan Honorer**

No	Presentase Penggunaan	Jumlah Sekolah	Persentase
1	< 5%	0	0,0
2	5 - 10%	14	17,7
3	11 - 15%	25	31,6
4	16 - 20%	22	27,8
5	21 - 25%	3	3,8
6	> 25%	15	19,0
Jumlah		79	100

*Sumber: Data Primer*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase penggunaan dana BOS untuk membayar honor guru ternyata cukup besar. Lebih dari 31,6% mengatakan di atas 11-15%

Untuk meningkatkan kompetensinya, guru-guru tentunya perlu melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan profesinya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan MGMP. Persentase penggunaan dana BOS untuk bidang ini dapat terlihat pada tabel 14 berikut:

**Tabel 14. Persentase penggunaan dana BOS untuk Pengembangan Profesi Guru**

No	Presentase Penggunaan	Jumlah Sekolah	Persentase
1	< 5%	15	20,3
2	5 - 10%	35	47,3
3	11 - 15%	18	24,3

No	Presentase Penggunaan	Jumlah Sekolah	Persentase
4	16 – 20%	5	6,8
5	21 – 25%	0	0,0
6	> 25%	1	1,4
Jumlah		74	100

Sumber: Data Primer

Tabel di atas memperlihatkan bahwa persentase penggunaan dana untuk pengembangan profesi guru di setiap sekolah sebagian besar mengalokasikan dana antara 5 sampai dengan 10% sebanyak 47,3%. Namun cukup banyak juga sekolah yang mengalokasikan dana di atas 11-15% (24,3%).

Di setiap sekolah tidak menutup kemungkinan terdapat siswa miskin, terlebih sekolah yang berada di daerah pinggiran. Terhadap siswa miskin, bukan saja dibebaskan dari seluruh iuran sekolah, tetapi juga dibantu agar mereka jangan sampai putus sekolah misalnya dengan pemberian uang transport. Persentase penggunaan dana untuk bidang ini dapat terlihat pada tabel 15 berikut:

**Tabel 15. Persentase penggunaan dana BOS untuk Biaya Transport Siswa Miskin**

No	Presentase Penggunaan	Jumlah Sekolah	Persentase
1	< 5%	46	82,1
2	5 – 10%	7	12,5
3	11 – 15%	2	3,6
4	16 – 20%	0	0,0
5	21 – 25%	0	0,0
6	> 25%	1	1,8
Jumlah		56	100

Sumber: Data Primer

Tabel di atas menggambarkan bahwa sebagian besar sekolah hanya mengalokasikan dana kurang dari 5% untuk memberi transport bagi siswa miskin.

Pengelolaan dana BOS tentu saja harus dipertanggungjawabkan. Sebagai bukti pertanggungjawaban, maka pihak pengelola dana BOS harus membuat administrasinya. Keperluan dana untuk administrasi pengelolaan BOS juga bisa dialokasikan dari dana BOS.

**Tabel 16. Persentase penggunaan dana BOS untuk Biaya Administrasi Pengelolaan BOS**

No	Presentase Penggunaan	Jumlah Sekolah	Persentase
1	< 5%	63	81,8
2	5 – 10%	8	10,4
3	11 – 15%	3	3,9
4	16 – 20%	2	2,6
5	21 – 25%	0	0,0
6	> 25%	1	1,3
Jumlah		77	100

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden (81,8%) mengatakan kurang dari 5% mengalokasikan dana BOS untuk biaya administrasi pengelolaan BOS.

Dana BOS sudah diluncurkan oleh Pemerintah sejak tahun 2005. Pengetahuan orang tua tentang adanya dana BOS terlihat sudah baik, sebagaimana dapat terlihat pada jawaban responden pada tabel 17 berikut:

**Tabel 17. Pengetahuan Orang Tua Siswa tentang Dana BOS**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Kurang Baik	1	1,3
2	Cukup Baik	17	21,5
3	Baik	49	62,0
4	Sangat Baik	12	15,2
Jumlah		79	100

Sumber: Data Primer

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa sebagian besar orang tua menyatakan bahwa mereka mengetahui dana BOS dari sekolah dan televisi. Artinya bahwa pihak sekolah sudah mensosialisasikan tentang dana BOS terhadap orang tua siswa. Disamping itu pula, masyarakat sudah menggunakan media masa untuk memahami kebijakan pemerintah yang sedang berjalan. Dengan adanya dana BOS, maka semua siswa miskin di sekolah harus dibebaskan dari segala iuran sekolah. Terhadap ketentuan ini, sebagian besar orang tua sudah mengetahuinya. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah tentu saja tidak bisa hanya menyandarkan pada dana BOS. Pemahaman orang tua akan hal ini tampaknya sudah bagus sebagaimana terlihat pada tabel 18 berikut:

**Tabel 18. Pendapat orang Tua tentang Kecukupan Dana BOS untuk Penyelenggaraan Pendidikan di sekolah**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Kurang Baik	1	1,3
2	Cukup Baik	13	16,7
3	Baik	48	61,5
4	Sangat Baik	16	20,5
Jumlah		78	100

Sumber: Data Primer

Tabel tersebut menggambarkan bahwa 61,5 % responden menjawab bahwa dana BOS baik untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu bagi masyarakat yang mampu tetap harus memberikan partisipasinya terhadap sekolah. Namun demikian, walaupun sebagian besar responden menyatakan dana BOS baik untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah, tetapi anggapan masyarakat dengan adanya dana BOS sekolah gratis tampaknya cukup berpengaruh. Artinya masyarakat menganggap tidak perlu lagi adanya iuran partisipasi orang tua terhadap pendidikan di sekolah tanpa melihat apakah mereka tergolong kaya atau miskin.

Adanya pemahaman orang tua yang menganggap dengan dana BOS masyarakat tidak perlu lagi memberikan partisipasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah diduga dipengaruhi oleh iklan layananan di televisi tentang dana BOS dan sekolah gratis. Iklan layananan ini juga yang akhirnya memunculkan pemahaman orang tua yang menganggap bahwa dengan adanya dana BOS, maka tidak perlu lagi adanya partisipasi orang tua terhadap sekolah (50,6%). Sedangkan yang menganggap tetap perlu partisipasi orang tua adalah 38 orang responden (17,7 %), selebihnya (31,6%) kadang-kadang perlu sekolah/madrasah untuk menarik iuran setelah ada dana BOS kepada siswa.

## KESIMPULAN

Implementasi kebijakan sekolah gratis tingkat pendidikan dasar melalui penggunaan dana BOS di Kabupaten Pemalang sudah mengacu pada ketentuan sebagaimana mestinya yaitu untuk hal-hal sebagai berikut: Administrasi penerimaan siswa baru, pembelian buku referensi, pembelian buku teks pelajaran untuk perpustakaan, membiayai kegiatan remedial, pengayaan

dan ekstra kurikuler, membiayai ulangan/ujian dan laporan hasil belajar siswa, beli bahan habis pakai, membayar langganan daya dan jasa, biaya perawatan sekolah, membayar honorarium guru honor dana tenaga kependidikan honorer, biaya pengembangan profesi guru, bantuan biaya transport bagi siswa miskin, biaya administrasi pengelolaan BOS, pembelian komputer untuk pembelajaran siswa.

Peran Serta Orang Tua dalam Kebijakan Sekolah Gratis adalah Pengetahuan orang tua tentang adanya dana BOS terlihat sudah baik, pihak sekolah selaku pengelola BOS memusyawarakannya dengan mengundang orang tua siswa, Secara umum pengaruh yang dirasakan oleh orang tua dengan adanya dana BOS adalah terbebasnya mereka dari berbagai iuran di sekolah. Sedangkan analisis peran serta komite adalah Sebagaimana diketahui bahwa dana BOS dimusyawarakannya antara sekolah/madrasah dengan komite maupun orang tua, dana BOS bertujuan untuk meringankan beban orang tua dalam pendidikan, dengan adanya dana BOS sekolah/madrasah tidak pernah lagi menentukan besarnya SOP dengan komite maupun dengan orang tua sering memberi masukan/saran kepada sekolah/madrasah dalam pengembangan pendidikannya, komite maupun orang tua selalu menyediakan fasilitas yang diperlukan.

#### Rekomendasi

Sebagai sebuah umpan balik dari kajian ini direkomendasikan:

1. Hendaknya sekolah/madrasah selalu mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah/madrasah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah/ madrasah.
2. Untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, dana BOS sebenarnya belum bisa melaksanakan pendidikan yang gratis untuk seluruh siswa. Untuk itu kepada pihak pemerintah daerah hendaknya menganggarkann adanya dana pendamping yaitu BOS Daerah.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan usul, saran dan senantiasa memberikan bimbingan, nasehat, dan motivasi kepada penulis sehingga penelitian ini selesai dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Gronlund, N.E. & Linn, R.L. 1990. *Measurement and evaluation in teaching*. (6<sup>th</sup>ed.). New York: Macmillan.
- Effendi, S. (1982). Unsur-unsur penelitian ilmiah. Dalam Masri Singarimbun (Ed.). *Metode penelitian survei*. Jakarta: LP3ES.
- Clark, T., Woodley, R., De Halas, D., 1962. Gas-Graphite Systems, in “*Nuclear Graphite*” R. Nightingale, Editor. Academic Press, New York, p. 387.
- Deal, B., Grove, A., 1965. General Relationship for the Thermal Oxidation of Silicon, *Journal of Applied Physics* 36, p. 3770.
- Deep-Burn Project: Annual Report for 2009, Idaho National Laboratory, Sept. 2009.
- Fachinger, J., den Exter, M., Grambow, B., Holgerson, S., Landesmann, C., Titov, M., Podruhzina, T., 2004. “Behavior of spent HTR fuel elements in aquatic phases of repository host rock formations,” 2<sup>nd</sup> International Topical Meeting on High Temperature Reactor Technology. Beijing, China, paper #B08.

- Fachinger, J., 2006. Behavior of HTR Fuel Elements in Aquatic Phases of Repository Host Rock Formations. Nuclear Engineering & Design 236, p. 54.
- Arifin,Zainal., 1991. Evaluasi Instruksional: Prinsip, Teknik, Prosedur, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto,Suharsimi., 2000. ManajemenPenelitian., Jakarta: RinekaCipta.
- Bentri,Alwen,dkk. "EfektivitasPelaksanaanWajibBelajar 9 Tahun di SumatraBarat" dalam puslitjaknov.org, diakses30 Oktober 2015.
- Dagun,Save M., 2006 Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Departemen Pendidikan Nasional., 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadeli., 2001. MetodePenelitianKependidikan, Padang: BaitulHikmah.
- Hajar,Ibnu., 1996. Dasar-dasarMetodologiPenelitianKualitatifdalamPendidikan, Jakarta: Rajawali Press.
- Irawan,Prasetya., 1999. LogikadanProsedurPenelitian, Jakarta: STIA-LAN Press.
- Mulyasa,E., 2008. MenjadiKepalaSekolahProfesionalDalamKonteksMenyukseskan MBS dan KBK, Jakarta: Rineka Cipta.
- NasutionS., MetodePenelitianNaturalistik-kualitatif, Bandung: Tarsito, 1988.
- Paslah,Asrono, "Pencapaian Program WajibBelajar 9 Tahun", dalam yusufsupendi.multiply.com, diakses30 Oktober 2015.
- Pidarta,Made., 1997. LandasanKependidikan, , Cet. I,Jakarta: RinekaCipta.
- Prayitno dan Erman Amti., 2000. Dasar-dasar Bimbingan Konseling, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sastropoetro,R.A. Santoso., 1988. Partisipasi, Komunikasi, PersuasidanDisiplindalam Pembangunan Nasional, Bandung: Alumni.
- Singarimbun,Masri., 1989. MetodePenelitian Survey, Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Administrasi dengan Metode R&D, Bandung: CV Alfabeta.
- Supriadi,Dedi., 2004. Membangunbangsamelaluipendidikan, editor:RohmatMulyana, Bandung: RemajaRosdakarya.
- Suyanto., 2003. Optimalisasi Peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, Semarang: Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan.
- Syarif,Hidayat., 1994. "Wajib Belajar dan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemerataan Pendidikan dalam Upaya Memajukan Desa Tertinggal", Makalah Presentasi, Bandung: IKIP Bandung.
- Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho., 2008. Kebijakan pendidikan: pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusuf,Muri., 1997. Dasar-dasar MetodePenelitian, Padang: FakultasIlmuPendidikan.